



RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2020



DINAS KOPERASI DAN UKM

KABUPATEN BONE

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan rancangan rencana kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone Tahun 2020. Rancangan rencana kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone Tahun 2020 disusun dengan diawali penjarangan aspirasi masyarakat dan dipadukan dengan rencana kerja (RENJA) Pemerintah Daerah. Rancangan rencana kerja tersebut sebagai acuan dan pedoman bagi Badan atau Dinas atau Kantor atau Perangkat kerja dilingkungan Kabupaten Bone dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan daerah serta menjadi acuan masyarakat dalam ikut serta berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah Tahun 2020.

Buku Rancangan Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone Tahun 2020 ini diharapkan dapat memberikan gambaran rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020.

Watampone, 01 Juli 2019

Kepala Dinas Koperasi, UKM
Kabupaten Bone



H. A. YUSUF, S.IP, MH

Pangkat : Pembina UtamaMuda

Nip :19690905 198903 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISIii
DAFTAR TABEL.....	.iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. LatarBelakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3. Maksud danTujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA OPD TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	6
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan OPD.....	14
2.3. Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi OPD	24
2.4. Review Terhadap RKPD	27
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	34
BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD	36
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	36
3.2. Tujuan dan sasaran Renja OPD	39
3.3 Program Dan Kegiatan	41
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD	43
BAB V PENUTUP	51

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
OPD.....7

Tabel 2.2.Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian
Renstra OPD s/d Tahun Berjalan.....8

Tabel 2.4.Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD23

Tabel 2.5.Tabel Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 202027

Tabel 2.6.Tabel Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat35

Tabel 3.1.Identifikasi Kebijakan Nasional dan Propinsi36

Tabel 3.2.Identifikasi Kebijakan Dalam RPJMD37

Tabel 3.3 Tujuan dan SasaranTahun 202039

Tabel 4.1. Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten
BoneTahun 202044

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana kinerja ini merupakan suatu aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di masa yang akan datang untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang. Sehingga pokok dari perencanaan kinerja adalah penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan melalui ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan.

Proses penyusunan Renja PD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja PD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja PD, orientasi mengenai RKPD dan Renja PD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja PD merupakan tahap awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja PD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD serta Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran biaya, satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk Tahun n dan Tahun $n+1$. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja PD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala PD menetapkan Renja PD untuk menjadi pedoman di lingkungan PD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas PD pada tahun anggaran berkenaan. Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada diatasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja Perangkat Daerah merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra Perangkat Daerah, dan RPJMD, bagi RKA Perangkat Daerah, KUA, PPAS dan RAPBD.

Renja PD merupakan dokumen rencana pembangunan PD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasikan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh PD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2019 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone 2020. Proses penyusunan Renja sesuai dengan bahan musrenbang RKPD Kabupaten Bone tahun 2020 yang akan mengacu pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2018-2023 sehingga akan memudahkan didalam mengukur target kinerja tahunan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan idiil dari Rencana Kerja PD Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone Tahun 2019 adalah Pancasila dan landasan konstitusional adalah UUD 1945, sedangkan landasan operasional adalah meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan Kabupaten Bone diantaranya :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286).
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421).
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara nomor 5587)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi.
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Bone.
 15. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 16. Peraturan Bupati Bone Nomor: 77 Tahun 2017 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone.
 17. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2017 Tentang APBD Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018.
 18. Peraturan Bupati Bone Tanggal Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018.
 19. Surat Edaran Bupati Bone Tanggal 12 Maret Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019.

20. Peraturan daerah Kabupaten Bone Nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3).
21. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone Tahun 2020 adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone untuk satu tahun mendatang. Secara rinci maksud dari penyusunan Renja PD Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah bagi seluruh jajaran manajemen Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
2. Sebagai dokumen perencanaan satu tahun guna membangun kinerja yang lebih akuntabel pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja adalah untuk perencanaan pengembangan, penumbuhan dan peningkatan dibidang koperasi dan usaha mikro melalui arah kebijakan, strategi serta sasaran-sasaran dan program yang ingin dicapai selama satu tahun serta mengukur kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam mendukung Pembangunan Daerah.

Dalam Rencana Kerja Tahun 2020 ini juga terdapat informasi-informasi yang memudahkan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam melakukan pengukuran dan penilaian kinerja, serta memudahkan dalam proses monitoring dan evaluasi kinerja, sehingga pada akhirnya kami dapat melakukan koreksi dini atas berbagai penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja PD Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone adalah mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan RPJP Daaerah dan

RPJM Daerah dan Renstra PD, terdiri dari 5 BAB dan beberapa lampiran disusun dengan sistematika sebagai berikut :

” SISTEMATIKA PENULISAN ”

BAB I Pendahuluan berisi : 1.1) Latar Belakang, berisi tentang : 1.2) Dasar Hukum Penyusunan, 1.3) Maksud dan Tujuan, 1.4) Sistematika Penulisan.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu, Bab ini memuat tentang 2.1) Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD. Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja PD Tahun-Tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan realisasi Renstra PD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan PD dan/atau realisasi APBD untuk PD yang bersangkutan, 2.2) Analisis Kinerja Pelayanan PD, 2.3) Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, 2.4) Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan, 2.5) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN berisi tentang : 3.1) Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi yaitu Penelaahan yang menyangkut Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional dan yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi PD, 3.2) Tujuan dan Sasaran Renja PD yaitu Perumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target Kinerja Renstra PD. 3.3) Program dan Kegiatan,

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

❖ KONSISTENSI PROGRAM/KEGIATAN DALAM RENJA TERHADAP RENSTRA

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu (2019) dan Capaian Renstra PD

Perihal Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu masih melekat pada satuan Dinas Koperasi, dan UKM Kabupaten Bone sebelum adanya dinas tahun berjalan saat ini yaitu satuan dinas baru Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Mengenai kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Diskop dan UKM Tahun 2019 terfokus hanya pada Bidang Koperasi dan Usaha Mikro serta progres pencapaian kinerja dalam Renstra periode 2018-2023 sehingga dapat teridentifikasi sampai sejauh mana Bidang Koperasi dan Bidang Usaha Mikro melaksanakan program dan kegiatannya.

Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Bidang Koperasi dan Bidang Usaha Mikro Kabupaten Bone dalam menjalankan program dan kegiatan yang direncanakan, faktor-faktor apa saja yang mendukung terpenuhinya target kinerja program/kegiatan dan hambatan / kendala yang menyebabkan target tidak tercapai.

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data Evaluasi Renja (Lampiran).

C. Evaluasi Program Tahun 2018

Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bone dalam rangka pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro pada tahun 2018 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.417.953.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.306.258.600,- atau 96,20 %. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu
Dan Capaian Renstra PD

No	Program dan Kegiatan	RENCANA (Rp.)	REALISASI (Rp.)	% DANA
1	2	3	4	5
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan menengah	437.660.000,-	401.156.200,-	91,67%
	Kegiatan Pengelolaan Penggunaan Dan Pemerintah Bagi Usaha Mikro	46.700.000,-	45.900.000,-	98,28 %
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM	274.960.000,-	271.669.700,-	98,80%,
	Kegiatan Pendataan UKM	80.900.000,-	80.600.000,-	99,62 %
	Kegiatan Pengembangan Kebijakan dan Program Ekonomi Lokal	35.100.000,-	29.865.000,-	85,08 %
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	920.089.390,-	905.102.400,-	98,37 %
2.	Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Dan Program Pembangunan Koperasi	76.990.000,-	76.908.000,-	99,96 %
	Kegiatan Sosialisasi Prinsip Pemahaman Koperasi	95.169.400,-	93.899.400,-	98,66%
	Pembinaan, Pengawasan dan penghargaan Koperasi Berprestasi	160.670.000,-	145.756.000,-	90,71 %
	Kegiatan Peningkatan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi	38.878.000,-	34.843.000,-	89,62 %
	Kegiatan Pembinaan dan pemantauan Administrasi Pengelola Pasar Tradisional	69.100.000,-	55.585.000,-	80,44 %
	Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi / KUD	105.466.000,-	90.316.000,-	85,63 %
	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	71.200.000,-	67.700.000,-	95,08 %
	Kegiatan Pwlatihan Manajemen Akuntansi Koperasi bagi pengurus Pengelola USP	78.304.000,-	74.674.000,-	95,36 %,
	Kegiatan Pembinaan dan penilaian KSP/USP	102.025.000,-	76.990.000,-	75,46 %
	Kegiatan Pembinaan Pemantauan Adminitrasi Keuangan KSP/USP	199.200.000,-	188.440.000,-	94,59 %
	JUMLAH	1.357.749.390,	1.306.258.600	96,20 %

Demikian Review evaluasi pelaksanaan program kegiatan di tahun 2018 adalah tercapai baik dengan capaian 96,20%. Mendukung Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran program kegiatan yang lebih matang berdasar evaluasi tahun sebelumnya perlu di ambil kebijakan lanjutan dalam memaksimalkan target program kegiatan pelaksanaan.

Langkah Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil adalah :

- a. Melakukan review/telaahan ulang terhadap target program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam renstra PD.
- b. Merencanakan target fisik dan keuangan maksimal sebanyak pada Tahun sebelumnya.

Tabel 2.2 (T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone

Nama Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan UKM Kab. Bone

lembar.....

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2018)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8-(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1				Urusan Wajib									
1	15			Bidang Koperasi dan UKM									
1	15	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran setiap tahun anggaran	469,548,700	429,969,500	672.517.300	634.589.450	94,36	468,548,700	511,035,883,33	10,83
1	15	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat ketersediaan jasa komunikasi (telepon/fax dan internet).	82,385,000	42,782,800	52,385,000	46,023,550	87,85	82,385,000	57,063,783,333	69,26

1	15	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi yang mendapatkan jasa keuangan selama setahun (kali).	76,659,200	132,206,000	162,444,200	149,773,800	92,20	76,659,200	347,486,433	45,3
1	15	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja	Jumlah pemenuhan dan jasa dan komponen AC,Komputer dan printer (paket).	8,000,000	1,825,000	4,096,300	2,586,300	63,13	8,000,000	4,137,100	51,71
1	15	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pembayaran media yang menyediakan bahan bacaan (kali).	10,000,000	4,500,000	7,500,000	6,320,000	84,26	10,000,000	6,940,000	69,4
1	15	01	23	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah Dan Luar Daerah	Tingkat keikutsertaan Aparat dalam kegiatan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tupoksi organisasi (kegiatan)	219,980,000	209,764,000	316,092,300	314,032,300	99,36	219,980,000	247,925,433	11,27
1	15	01	24	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan ATK,barang cetakan dan penggandaan serta makan dan minum harian/tamu (paket).	71,524,500	38,891,700	129,999,500	115,853,500	89,11	71,524,500	75,423,233	10,54
1	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan realisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran.	221,627,400	287,289,400	604.270.300	583.823.550	96,61	221,627,400	364,246,783	16,43
1	15	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor sesuai rencana kebutuhan satu tahun anggaran (paket).	44,998,900	67,450,000	59,050,000	59,050,000	-	44,998,900	57,166,300	12,70
1	15	02	07	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor sesuai rencana kebutuhan satu tahun anggaran (paket).	19,625,000	24,500,000	103,000,000	103,000,000	100.00	19,625,000	49,041,66	24,98
1	15	02	10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur sesuai rencana kebutuhan satu tahun anggaran (paket)	17,000,000	55,150,000	107,500,000	107,500,000	100.00	17,000,000	59,883,33	35,22

1	15	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin berkala gedung kantor (kegiatan)	58,053,500	119,141,400	237.020.300	233,141,300	98,36	58,053,500	136,778,73	23,56
1	15	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas (paket).	81,950,000	21,048,000	97.700.000	81,132,250	83,04	81,950,000	61,376,75	7,48
1	15	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ketersediaan aparat Pembina koperasi yang bersertifikat	90,000,000	-	230,000,000	201,507,000	87,61	90,000,000	97,169,000	107,96
1	15	05	01	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparat yang mengikuti kegiatan bimtek dan diklat structural (orang).	90,000,000	-	230.000.000	201,507,000	87,61	90,000,000	97,169,000	107,96
1	15	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan realisasi penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan setiap tahun anggaran.	34,500,000	41,380,000	30.000.000	28,350,000	94,5	34,500,000	34,743,333	100,70
1	15	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan (dokumen).	34,500,000	41,380,000	30.000.000	28,350,000	94,5	34,500,000	34,743,333	100,70
1	15	16		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase peningkatan kualitas pelaku usaha mikro	147,435,900	-		-	-	147,435,900	49,145,300	33,33

1	15	16	06	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah UM yang dilatih dan difasilitasi bantuan alat usaha (UM)	147,435,900	-	-	-	-	147,435,900	49,145,300	33,33
1	15	17		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Cakupan pelaksanaan pengembangan usaha bagi usaha mikro	318,250,000	1,172,082,800	437,260,000	428,034,700	97,89	639,455	533,584,985	167,66
1	15	17	05	Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah WUB yang dibina (WUB).	43,600,000	53,320,000	46.700.000	45,900,000	98,28	43,600,000	47,606,666	109,18
1	15	17	09	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi promosi (UKM).	133,150,000	178,015,000	274.960.000	271,669,700	98,80	133,150,000	194,278,233	145,90
1	15	17	10	Pengembangan Kebijakan Dan Program Peningkatan Ekonomi lokal	Jumlah keluarga miskin usia produktif yang difasilitasi pelatihan kewirausahaan (orang)	60,600,000	32,461,070	35,100,000	29,865,000	85,08	60,600,000	82,526,070	25.38
1	15	17	13	Pendataan UMKM	Jumlah data usaha mikro pertahun (UM).	80,900,000	74,895,000	80,900,000	80,600,000	99.62	80,900,000	65,431,667	136,181
1	15	18		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Cakupan pelaksanaan program peningkatan kulaitas kelembagaan koperasi selama satu tahun anggaran	720,138,000	1,172,082,800	997,000,400	905,111,400	90,78	720,138,000	932,444,066	129,48
1	15	18	01	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Dan Program Pembangunan Koperasi	Jumlah koperasi yang difasilitasi penyuluhan dan mendapatkan legalitas lembaga (peserta)	112,670,000	270,220,000	76,990,000	76,908,000	99,89	112,670,000	153,266,000	136,03

01	15	18	04	Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian	Jumlah SDM Pengurus/pengawas koperasi yang mengikuti sosialisasi (orang).	68,480,000	57,115,000	95,169,400	93,899,400	98,66	68,480,000	73,164,800	106,84
1	15	18	05	Pembinaan Pengawasan Dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah koperasi berprestasi yang difasilitasi pertahun berdasarkan pemeringkatan (penghargaan).	122,870,000	109,674,000	160,670,000	145,756,000	90,71	122,870,000	126,100,000	102,62
1	15	18	06	Peningkatan Dan Pengembangan Jaringan kerjasama Usaha Koperasi	Jumlah koperasi yang difasilitasi promosi/temu Mitra dengan pihak ketiga (koperasi).	35,998,000	40,195,000	38,878,000	34,843,000	89,62	35,998,000	37,012,000	102,81
1	15	18	09	Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah koperasi yang di monitoring dan dievaluasi pertahun (koperasi).	40,000,000	31,815,000	71,200,000	67,700,000	95,08	40,000,000	46,505,000	116.26
1	15	18	11	Pelatihan Manajemen Akuntansi Koperasi Bagi Pengurus Pengelola USP	Jumlah pengurus/pengelola KSP/USP yang dilatih (orang).	54,804,000	56,644,400	78,304,000	74,674,000	95,36	54,804,000	62,040,800	113,20
1	15	18	12	Pembinaan Dan Penilaian Kesehatan KSP/USP	Jumlah koperasi sehat yang dinilai (koperasi)	37,250,000	44,923,400	102,025,000	76,990,000	75,46	37,250,000	31,773,333	61.07
1	15	18	13	Pembinaan Pemantauan Administrasi Keuangan KSP/USP	Jumlah fasilitas koperasi sehat (koperasi).	143,800,000	184,500,000	199,200,000	188,440,000	94,59	143,800,000	172,246,666	119,78
1	15	18	17	Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Administrasi Koperasi Pengelolaan Pasar Tradisional	Jumlah pembinaan koperasi pasar Tradisional (kegiatan).	29,800,000	46,340,000	69,100,000	55,585,000	80,44	29,800,000	43,908,333	147,34
1	15	18	18	Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD	Jumlah koperasi /KUD yang dilatih (koperasi).	74,466,000	77,746,000	105,464,000	90,316,000	85,63	74,466,000	80,842,666	108,56
1	15	08		Program Penunjang Pemerintahan umum.	Cakupan realisasi kegiatan penunjang pemerintahan umum setiap Tahun Anggaran	49,500,000	-	-	-	-	49,500,000	16,500,000	33,33
1	15	08	01	Penyusunan rencana perangkat daerah.	Jumlah dokumen Renstra,Renja, Renja perubahan,RKA,DPA,DPPATersedia tepat waktu (dokumen).	31,000,000	-	-	-	-	31,000,000	10,333,333	33,33
1	15	08	02	Pengelolaan Website Perangkat Daerah.	Jumlah pemeliharaan website diskop yang dikelola (kegiatan).	18,500,000	-	-	-	-	18,500,000	6,166,666	33,33

0	1	1	0	Program pengembangan teknologi informasi koperasi dan UKM		35,100,000					11,700,000	117,00
1	9	0	1	Keg : Pengembangan Teknologi Informasi Koperasi dan UMKM	Jaringan teknologi informasi Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten Bone	35,100,000	28,550,000	28,500,000	100,00		106,700,000	10,67

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 08 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone, selanjutnya ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone.

Dalam melaksanakan Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mempunyai tugas:

” Merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang koperasi dan usaha mikro “

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone, mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha mikro;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha mikro;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, usaha mikro;
4. Pelaksanaan administrasi dinas;

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi diatas, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone terdapat susunan organisasi yang terdiri dari

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris dengan 2 sub bagian
- c. Kepala Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi dengan 3 seksi
- d. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan dengan 3 seksi
- e. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro dengan 3 seksi

Sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Bone telah ditetapkan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

TUGAS :

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

FUNGSI :

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro.
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIS

TUGAS

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah dalam melaksanakan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggungjawab kedinasan.

FUNGSI

- a. Penyusunan program dan anggaran pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
- b. Pelaksanaan program dan anggaran.
- c. Pengoordinasian tugas-tugas pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain Dinas koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
- d. Penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang-undangan, pengelolaan bahan bacaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat.
- e. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada kepala dinas.
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga.
- g. Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan.
- h. Pelaksanaan pembinaan ASN di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

2.1 KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

TUGAS

Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-menyurat, naskah dinas dan pengelolaan kearsipan.
- b. Menyusun rencana formasi, informasi jabatan serta data kepegawaian.
- c. Membuat usul mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, pemberhentian, izin belajar, kartu pegawai, kartu askes dan pembinaan karir pegawai.
- d. Menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, keprotokolan, kehumasan dan penyiapan rapat-rapat dinas.
- e. Melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program pendidikan dan pelatihan.
- f. Melaksanakan pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas, gedung kantor, perlengkapan kantor dan aset lainnya.
- g. Menyiapkan penghapusan sarana dan prasarana/perlengkapan/aset.
- h. Melaksanakan pembinaan ASN pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

2.2 KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

TUGAS

Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, perencanaan, penyusunan, monitoring, pelaporan dan evaluasi program kerja dan keuangan.
- b. Melaksanakan fasilitasi dan penyelarasan program dan penganggaran di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
- c. Melaksanakan sosialisasi program dan keuangan di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
- d. Melaksanakan penyusunan laporan tahunan, laporan triwulan, laporan bulanan, laporan pertanggungjawaban dan laporan kinerja.
- e. Menyiapkan rencana umum pengadaan.
- f. Membuat rencana kerja tahunan.
- g. Menyusun program dan kegiatan bidang keuangan, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen

keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- h. Mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber-sumber penerimaan dinas.
- i. Mengatur dan menjalankan administrasi keuangan sesuai pedoman akuntansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan.
- j. Mengawasi dan melaksanakan verifikasi administrasi keuangan.
- k. Membina dan mengatur penatausahaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- l. Membuat evaluasi pelaporan kemajuan penggunaan anggaran (rencana dan realisasi) secara berkala.
- m. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Program dan Keuangan.
- n. Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan dinas sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- o. Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi, perbendaharaan, pembukuan keuangan dan pelaporan keuangan.
- p. Menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Program dan Keuangan.
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait tugasnya.

3. KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN TUGAS

Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan, perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi

FUNGSI

- a. Penganalisaan dokumen permohonan izin usaha simpan pinjam.
- b. Penganalisaan dokumen izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas.
- c. Penganalisaan berkas pembentukan koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi.
- d. Penganalisaan berkas pembubaran koperasi.
- e. Perencanaan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit usaha simpan pinjam.
- f. Perencanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi.
- g. Penganalisaan data dan jumlah koperasi serta koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam yang akurat.

- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

3.1 KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN PERIZINAN

TUGAS

Kepala Seksi Kelembagaan dan Perizinan mempunyai tugas :

- a. Menganalisis dokumen permohonan izin usaha simpan pinjam.
- b. Menganalisis dokumen izin pembubaran kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas.
- c. Menganalisis berkas pembentukan koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi.
- d. Menganalisa berkas pembubaran koperasi.
- e. Merencanakan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/ unit usaha simpan pinjam.
- f. Merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi.
- g. Menganalisis data dan jumlah koperasi serta koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam yang akurat.
- h. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang kelembagaan dan pengawasan terkait tugasnya.

3.2 KEPALA SEKSI KEANGGOTAAN DAN PENERAPAN PERATURAN

TUGAS

Kepala Seksi Keanggotaan Dan Penerapan Peraturan mempunyai tugas :

- a. Menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan.
- b. Menganalisis penerapan sanksi bagi koperasi.
- c. Merencanakan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Bidang Kelembagaan dan Pengawasn terkait tugasnya.

3.3 KEPALA SEKSI PENGAWASAN, PEMERIKSAAN DAN PENILIAIAN KESEHATAN

TUGAS

Kepala Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian mempunyai tugas :

- a. Merencanakan upaya penciptaan iklim usaha yng sehat melalui penilaian kesehatan koperasi.
- b. Melaksanakan analisis data penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam.
- c. Menyusun data kesehatan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam.
- d. Memeriksa dan mengawasi kelembagaan dan usaha koperasi.

- e. Memeriksa dan mengawasi koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang kelembagaan dan pengawasan terkait tugasnya.

4. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI TUGAS

Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan, perumusan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang Pemberdayaan Koperasi.

FUNGSI

- a. Pengorganisasian pelaksanaan pemberdayaan koperasi
- b. Pengorganisasian perluasan akses pembiayaan/ permodalan bagi koperasi.
- c. Pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk koperasi di tingkat lokal dan nasional.
- d. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi.
- e. Pelaksanaan kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya.
- f. Pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi.
- g. Pelaksanaan perlindungan koperasi.
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang dinas terkait tugas dan fungsinya.

4.1 KEPALA SEKSI FASILITASI USAHA KOPERASI TUGAS

Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi mempunyai tugas sebagai berikut ;

- a. Merencanakan pelaksanaan pemberdayaan koperasi.
- b. Membuat konsep kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya.
- c. Mengembangkan akses pasar bagi produk koperasi ditingkat lokal dan nasional.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi terkait tugasnya.

4.2 KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN, PENGUATAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI TUGAS

Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengembangkan perluasan akses pembiayaan/ permodalan bagi koperasi.
- b. Merencanakan pelaksanaan perlindungan koperasi.
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi terkait tugasnya.

4.3 KEPALA SEKSI PENINGKATAN KUALITAS SDM KOPERASI

TUGAS

Kepala Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi.
- b. Menyusun konsep pengembangan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi.
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi terkait tugasnya.

5. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

TUGAS

Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melakukan penyiapan, perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang Pemberdayaan Usaha Mikro.

FUNGSI

- a. Pengordinasian pemberdayaan dan Perlindungan usaha mikro.
- b. Pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk usaha mikro di tingkat lokal dan nasional.
- c. Pengordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro.
- d. Pengordinasian pendataan izin usaha mikro kecil menengah (IUMK)
- e. Pengordinasian pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil.
- f. Pengordinasian penengembangan kewirausahaan.
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

5.1 KEPALA SEKSI FASILITASI USAHA MIKRO

TUGAS

Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Mikro mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Merancang akses pasar bagi produk usaha mikro di tingkat lokal dan nasional.
- b. Menganalisis data izin usaha mikro kecil (IUMK)
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro.

5.2 KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN, PENGUATAN DAN PERLINDUNGAN USAHA MIKRO

TUGAS

Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan Dan Perlindungan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengembangkan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro.
- b. Merencanakan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil.
- c. Merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro terkait tugasnya.

5.3 KEPALA SEKSI PENINGKATAN KUALITAS KEWIRAUSAHAAN

TUGAS

Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan mempunyai tugas sebagai berikut ;

- a. Merencanakan pengembangan kewirausahaan.
- b. Melaksanakan pengembangan kewirausahaan
- c. Memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pengembangan kewirausahaan.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro terkait tugasnya.

Dinas Koperasi Kabupaten Bone dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selain memiliki personil dengan latar belakang pendidikan dan ketrampilan sebagaimana telah diuraikan diatas, namun sarana dan prasarana guna menunjang kegiatan organisasi perlu ditingkatkan lagi mengingat gedung kantor belum memadai.

Sedangkan untuk pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah mengacu pada perubahan kedua dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 setelah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, dan diubah kembali menjadi Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mana dalam rangka proses pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan anggaran PD dilakukan secara manual maupun menggunakan aplikasi Komputer sehingga tertib administrasi pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone, maka Analisa Capaian Kinerja yang dipakai untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi.

Untuk mengukur rencana keberhasilan capaian rencana kinerja dimaksud, digunakan instrument pengukuran ordinal dengan memperhitungkan indikator masukan, keluaran dan hasil.

Adapun Persentase skala pengukuran kinerja sebagai berikut:

85-100 = Sangat baik/Sangat berhasil

70-<85 = Baik/Berhasil

55-<70 = Kurang Baik/Kurang Berhasil

<55 = Sangat Kurang Baik/Tidak Berhasil

Pencapaian kinerja pelayanan PD Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone dapat dilihat pada Tabel 2.4

Tabel 2.4 (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan UKM kab. Bone
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Koperasi Aktif dan koperasi sehat	-	Koperasi Aktif	51,13 Persen	30,39 Persen	32,44 Persen	34,50 Persen	58,96 Persen (283 / 480)	-	32,445 Persen	34,50 Persen	
2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	-	Usaha Mikro	65,6 Persen	99,91 Persen	99,86 Persen	99,86 Persen	87,8 Persen (9628 / 9933)	-	99,86 Persen	99,86 Persen	

Dari hasil kinerja pada tahun 2019 jika dimasukan pada scoring tolok ukur capaian kinerja akan diperoleh sebagai berikut:

No.	Sasaran RPJMD	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya jumlah usaha mikro, kecil dan menengah yang berkembang dan bertambahnya Jumlah wirausahabaru	Berhasil
2	Meningkatnya koperasi aktif dan koperasi sehat	Berhasil

Dari Tabel 2.4 dapat kita jelaskan bahwa pencapaian kinerja pelayanan PD Bidang Koperasi dan UKM dapat mencapai realisasi 100% dari target kinerja ini berarti baik / berhasil. Hal ini dikarenakan adanya perencanaan yang matang dan dedikasi sumberdaya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Sebelum dapat menentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, terlebih dahulu harus kita ketahui permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, yaitu :

- a. Aspek Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro
 - ☐ Masih banyak koperasi yang belum menerapkan prinsip-prinsip koperasi secara benar.
 - ☐ Masih banyaknya koperasi tidak aktif, seperti pengurus,pengawas tidak bekerja sebagaimana tupoksinya.
 - ☐ Rapat Anggota Tahunan belum dilaksanakan dengan secara menyeluruh oleh Gerakan Koperasi.
 - ☐ Masih adanya Asosiasi yang belum dimanfaatkan oleh UKM.
 - ☐ sebagaimana mestinya.
 - ☐ Masih banyak Koperasi yang tidak aktif dan tidak sehat ,Dan koperasi mengalami hambatan.
- b. Aspek Sumber Pembiayaan
 - o Pada umumnya Koperasi dan UKM masih belum memanfaatkan sepenuhnya pembiayaan melalui lembaga keuangan bank maupun non Bank.
 - o Pada umumnya koperasi sulit mendapatkan dana perkuatan dana lembaga keuangan.

- o Banyaknya Koperasi yang tidak aktif mempengaruhi penyaluran fasilitas
 - o Sanksi hukum tidak tegas dan tidak jelas terhadap Koperasi yang melakukan tindak pidana maupun Perdata.
- c. Akses Pasar (Promosi, sarana pemasaran produk dan terbatasnya pameran produk-produk koperasi)
- o Belum optimal Pemanfaatan IT sebagai salah satu sarana pemasaran dan pengembangan produk.
 - o Belum optimalnya penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro melalui pameran-pameran baik tingkat lokal maupun nasional, Promosi Kabupaten dengan Provinsi, promosi bazar Usaha Mikro.
 - o Mutu produk Koperasi dan Usaha Mikro belum memenuhi standar pasar. Produk unggulan lokal belum berdaya saing.
 - o Tidak tercapainya target produksi dalam pemasaran.
- d. Aspek SDM dan Pelaku UKM/Koperasi
- o Kurangnya minat wirausaha baru Koperasi dan Usaha Mikro
 - o Kurangnya pengetahuan anggota tentang tata cara berkoperasi yang benar.
 - o Kurangnya standar kompetensi gerakan Koperasi.
- e. Aspek Manajemen Koperasi dan Usaha Mikro
- o Masih kurangnya aspek kemampuan SDM pelaku Koperasi dan Usaha Mikro dalam pengelolaan dan pengembangan usahanya.
 - o Kurang optimalnya penguasaan manajemen pengelolaan Ritel koperasi. Pengelolaan Manajemen KSP/USP masih belum optimal.
 - o Kurangnya pemanfaatan IT dalam pengelolaan manajemen Koperasi dan UMKM.
- f. Aspek Penguasaan Teknologi, Desain produk, Sertifikasi produk dan lain - lain.
- o Masih kurangnya kemampuan SDM Koperasi dan Usaha Mikro dalam mendiversifikasi produknya.
 - o Terbatasnya informasi tentang kemajuan teknologi yang bisa dikerjakan oleh koperasi.
- g. Pengelolaan Program Strategis (Koperasi wanita)
- Masih banyaknya SDM Pengelola (Pengurus dan Pengawas) Koperasi yang belum memahami tentang pengelolaan koperasi baik secara administrasi organisasi maupun administrasi keuangan, sehingga perlu diadakan bimtek serta pendampingan yang berkelanjutan.

Setelah kita ketahui berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, maka dapat ditentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi sebagai berikut :

1. Mengembangkan Koperasi sebagai perwujudan ekonomi kerakyatan dengan peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha yang kuat, sehat, tangguh dan mandiri.
2. Meningkatkan daya saing kelembagaan dan usaha Koperasi dan Usaha Mikro terhadap persaingan ekonomi global
3. Peningkatan kualitas penyajian data dan Informasi dalam penyusunan kebijakan Koperasi dan Usaha Mikro
4. Mengembangkan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi Usaha Kecil
5. Meningkatkan peran Koperasi dalam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, dengan penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktifitas dan daya saing.

Dengan terformulasinya isu-isu penting tersebut diatas, diharapkan akan berdampak positif terhadap visi dan Misi Bupati Bone serta sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah khususnya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone.

Tabel 2.5. (T-C.31.)

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2020
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone

Nama Perangkat Daerah : Dinas Koperasi Dan UKM Kab. Bone

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran setiap tahun anggaran		435,359,200	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran terhadap Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Koperasi Dan UKM selama satu Tahun Anggaran		435,359,200	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Tanete Riattang	Tingkat ketersediaan jasa komunikasi (telepon/fax dan internet).	48 Rekening	68,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Tanete Riattang	Tingkat ketersediaan jasa komunikasi (telepon/fax dan internet).	48 Rekening	68,000,000	
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kecamatan Tanete Riattang	Jumlah tenaga administrasi yang mendapatkan jasa keuangan selama setahun (kali).	324 kali	96.859.200	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kecamatan Tanete Riattang	Jumlah tenaga administrasi yang mendapatkan jasa keuangan selama setahun (kali).	324 kali	96.859.200	

3	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja	Kecamatan Tanete Riattang	Jumlah pemenuhan dan jasa dan komponen AC,Komputer dan printer (paket).	4 paket	8,500,000	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja	Kecamatan Tanete Riattang	Jumlah pemenuhan dan jasa dan komponen AC,Komputer dan printer (paket).	4 paket	8,500,000	
4	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Tanete Riattang	Jumlah pembayaran media yang menyediakan bahan bacaan (kali).	120 kali	10.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Tanete Riattang	Jumlah pembayaran media yang menyediakan bahan bacaan (kali).	120 kali	10.000.000	
5	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah Dan Luar Daerah	Kecamatan Tanete Riattang	Tingkat keikutsertaan Aparat dalam kegiatan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tupoksi organisasi (kegiatan)	35 kegiatan	180,000,000	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah Dan Luar Daerah	Kecamatan Tanete Riattang	Tingkat keikutsertaan Aparat dalam kegiatan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tupoksi organisasi (kegiatan)	35 kegiatan	180,000,000	
6	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Tanete Riattang	Tingkat Ketersediaan ATK,barang cetakan dan penggandaan serta makan dan minum harian/tamu (paket).	48 paket	72,000,000	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Tanete Riattang	Tingkat Ketersediaan ATK,barang cetakan dan penggandaan serta makan dan minum harian/tamu (paket).	4 paket	72,000,000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan realisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran.		107,243,500	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan realisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran.		107,243,500	
7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kecamatan Tanete Riattang	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor sesuai rencana kebutuhan satu tahun anggaran (paket).	1 paket	6.000.000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kecamatan Tanete Riattang	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor sesuai rencana kebutuhan satu tahun anggaran (paket).	1 paket	6.000.000	

8	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kecamatan Tanete Riattang	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor sesuai rencana kebutuhan satu tahun anggaran (paket).	1 Paket	2,000,000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kecamatan Tanete Riattang	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor sesuai rencana kebutuhan satu tahun anggaran (paket).	2 Paket	2,000,000	
9	Pengadaan Mebeleur	Kecamatan Tanete Riattang	Jumlah pengadaan mebeleur sesuai rencana kebutuhan satu tahun anggaran (paket)	1 paket	7.000.000	Pengadaan Mebeleur	Kecamatan Tanete Riattang	Jumlah pengadaan mebeleur sesuai rencana kebutuhan satu tahun anggaran (paket)	1 paket	7.000.000	
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kecamatan Tanete Riattang	Jumlah pemeliharaan rutin berkala gedung kantor (kegiatan)	1 kegiatan	10.293.500	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kecamatan Tanete Riattang	Jumlah pemeliharaan rutin berkala gedung kantor (kegiatan)	1 kegiatan	10.293.500	
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Tanete Riattang	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas (paket).	11 paket	81.950.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Tanete Riattang	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas (paket).	11 paket	81.950.000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase ketersediaan aparat Pembina koperasi yang bersertifikat		98,000,000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase ketersediaan aparat Pembina koperasi yang bersertifikat		98,000,000	
12	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Tanete Riattang	Jumlah aparat yang mengikuti kegiatan bimtek dan diklat structural (orang).	5 orang	98,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Tanete Riattang	Jumlah aparat yang mengikuti kegiatan bimtek dan diklat structural (orang).	5 orang	98,000,000	

	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Cakupan realisasi penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan setiap tahun anggaran.		33,500,000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Cakupan realisasi penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan setiap tahun anggaran.		33,500,000	
13	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Tanete Riattang	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan (dokumen).	5 Dokumen	33,500,000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Tanete Riattang	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan (dokumen).	5 Dokumen	33,500,000	
	Program Penunjang Pemerintahan Umum		Cakupan realisasi kegiatan penunjang pemerintahan umum setiap tahun anggaran		45,250,000	Program Penunjang Pemerintahan Umum		Cakupan realisasi kegiatan penunjang pemerintahan umum setiap tahun anggaran		45,250,000	
14	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Kecamatan Tanete Riattang	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, Renja perubahan, RKA, DPA, DPPA tersedia tepat waktu (dokumen)	5 Dokumen	32.250.000	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Dalam daerah dan luar daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, Renja perubahan, RKA, DPA, DPPA tersedia tepat waktu (dokumen)	5 Dokumen	32.250.000	
15	Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Kecamatan Tanete Riattang	Jumlah pemeliharaan website diskop yang dikelola (kegiatan)	1Kegiatan	13,000,000	Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang	Jumlah pemeliharaan website diskop yang dikelola (kegiatan)	1Kegiatan	13,000,000	
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		Persentase peningkatan kualitas pelaku usaha mikro		41,500,000	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		Persentase peningkatan kualitas pelaku usaha mikro		41,500,000	

16	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Tanete Riattang (kel.watampone), Tonra (desa rappa), Kajuara (desa pude,raja).	Jumlah UM yang dilatih dan difasilitasi bantuan alat usaha (UM)	90 UM	41.500.000	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Tanete Riattang (kel.watampone), Tonra (desa rappa), Kajuara (desa pude,raja).	Jumlah UM yang dilatih dan difasilitasi bantuan alat usaha (UM)	90 UM	41.500.000	
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		Persentase peningkatan produktifitas usaha mikro kecil menengah.		297,550,000	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		Persentase peningkatan produktifitas usaha mikro kecil menengah.		297,550,000	
17	Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Kota/kecamatan	Jumlah WUB yang dibina (WUB)	120 WUB	27,500,000	Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Kota/kecamatan	Jumlah WUB yang dibina (WUB)	120 WUB	27,500,000	
18	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Dalam daerah,Kab.kota, luar daerah,TK.1/Pusat Tk.	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi promosi (UKM).	20 UKM	153,500,000	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Dalam daerah,Kab.kota, luar daerah,TK.1/Pusat Tk.	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi promosi (UKM).	20 UKM	153,500,000	
19	Pengembangan Kebijakan Dan Program Peningkatan Ekonomi lokal	Kecamatan Cenrana	Jumlah keluarga miskin usia produktif yang difasilitasi pelatihan kewirausahaan (orang)	20 orang	44,650,000	Pengembangan Kebijakan Dan Program Peningkatan Ekonomi lokal	Kecamatan Cenrana	Jumlah keluarga miskin usia produktif yang difasilitasi pelatihan kewirausahaan (orang)	20 orang	44,650,000	
20	Pendataan UMKM	Kab.bone	Jumlah data usaha mikro pertahun (UM).	1800 UM	71,900,000	Pendataan UMKM	Kab.bone	Jumlah data usaha mikro pertahun (UM).	1800 UM	71,900,000	
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi		Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan dan produktifitas koperasi		556,597,300	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi		Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan dan produktifitas		556,597,300	

								koperasi			
21	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Dan Program Pembangunan Koperasi	5 Kecamatan	Jumlah koperasi yang difasilitasi penyuluhan dan mendapatkan legalitas lembaga (peserta)	100 peserta	93,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Dan Program Pembangunan Koperasi	5 Kecamatan	Jumlah koperasi yang difasilitasi penyuluhan dan mendapatkan legalitas lembaga (peserta)	100 peserta	93,000,000	
22	Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian	Kecamatan Tanete Riattang	Jumlah SDM Pengurus/pengawas koperasi yang mengikuti sosialisasi (orang).	100 orang	52,250,000	Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian	Kecamatan Tanete Riattang	Jumlah SDM Pengurus/pengawas koperasi yang mengikuti sosialisasi (orang).	100 orang	52,250,000	
23	Pembinaan Pengawasan Dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	8 Kecamatan	Jumlah koperasi berprestasi yang difasilitasi setahun berdasarkan pemeringkatan (penghargaan).	10 Penghargaan	98,500,000	Pembinaan Pengawasan Dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	8 Kecamatan	Jumlah koperasi berprestasi yang difasilitasi setahun berdasarkan pemeringkatan (penghargaan).	10 Penghargaan	98,500,000	
24	Peningkatan Dan Pengembangan Jaringan kerjasama Usaha Koperasi	Luar daerah provinsi	Jumlah koperasi yang difasilitasi promosi/temu Mitra dengan pihak ketiga (koperasi).	5 Koperasi	29,500,000	Peningkatan Dan Pengembangan Jaringan kerjasama Usaha Koperasi	Luar daerah provinsi	Jumlah koperasi yang difasilitasi promosi/temu Mitra dengan pihak ketiga (koperasi).	5 Koperasi	29,500,000	
25	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	15 Kecamatan	Jumlah koperasi yang di monitoring dan dievaluasi setahun (koperasi).	35 Koperasi	30,500,000	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	15 Kecamatan	Jumlah koperasi yang di monitoring dan dievaluasi setahun (koperasi).	35 Koperasi	30,500,000	
26	Pelatihan Manajemen Akuntansi Koperasi Bagi Pengurus Pengelola USP	Kecamatan Tanete Riattang	Jumlah pengurus/pengelola KSP/USP yang dilatih (orang).	25 Orang	47,000,000	Pelatihan Manajemen Akuntansi Koperasi Bagi Pengurus Pengelola USP	Kecamatan Tanete Riattang	Jumlah pengurus/pengelola KSP/USP yang dilatih (orang).	25 Orang	47,000,000	

27	Pembinaan Dan Penilaian Kesehatan KSP/USP	15 Kecamatan	Jumlah koperasi sehat yang dinilai (koperasi)	25 Koperasi	30,250,000	Pembinaan Dan Penilaian Kesehatan KSP/USP	15 Kecamatan	Jumlah koperasi sehat yang dinilai (koperasi)	25 Koperasi	30,250,000	
28	Pembinaan Pemantauan Administrasi Keuangan KSP/USP	10 Kecamatan	Jumlah fasilitas koperasi sehat (koperasi).	10 Koperasi	98,000,000	Pembinaan Pemantauan Administrasi Keuangan KSP/USP	10 Kecamatan	Jumlah fasilitas koperasi sehat (koperasi).	10 Koperasi	98,000,000	
29	Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Administrasi Koperasi Pengelolaan Pasar Tradisional	Kecamatan Tanete Riattang	Jumlah pembinaan koperasi pasar Tradisional (kegiatan).	3 kegiatan	23,300,000	Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Administrasi Koperasi Pengelolaan Pasar Tradisional	Kecamatan Tanete Riattang	Jumlah pembinaan koperasi pasar Tradisional (kegiatan).	3 kegiatan	23,300,000	
30	Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD	Kecamatan Tanete Riattang	Jumlah koperasi /KUD yang dilatih (koperasi).	70 koperasi	55,297,300	Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD	Kecamatan Tanete Riattang	Jumlah koperasi /KUD yang dilatih (koperasi).	70 koperasi	55,297,300	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan koperasi, pelaku Usaha Mikro, masyarakat serta Organisasi lainnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, mendapatkan usulan dan saran program atau kegiatan dari para stakeholders.

Proses penyusunan anggaran dan penganggaran kinerja dimulai dari Sub. Bagian Program dan Keuangan yang kemudian dikonsolidasikan kepada setiap bidang yang ada di Dinas Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bone melalui dokumen usulan anggaran yang disebut Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang kemudian disetujui oleh Kepala Dinas. RKA kemudian dikirim ke pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dan diteliti oleh Tim Anggaran Eksekutif untuk dinilai kelakanya (berdasarkan) Urgensi dan (ketersediaan dana) di akomodasikan dalam RAPBD yang akan disampaikan kepada legislatif. RAPBD kemudian dipelajari oleh panitia anggaran legislatif dan direspon oleh semua komisi dan fraksi dalam pembahasan anggaran.

Semua usulan disesuaikan dengan target RPJMD tahun 2019-2023 dan tugas pokok dan fungsi dari setiap bidang yang ada di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone. Rencana Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro merupakan penjabaran dari susunan dan program yang dilakukan seiring dengan kebijakan anggaran dan komitmen seluruh Staf, namun dalam pelaksanaannya didukung pula dengan beberapa program sesuai dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.6

Tabel 2.6 (T-C.32)

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone

Nama Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan UKM kab. Bone

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Kec. Tanete Riattang, Kec. Kajuara dan Kec. Tonra	Terlaksana Pelatihan Tiga Kali Di Tiga Kecamatan	195,000,000.00	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD

3.1 Telaahan Terdapat Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional yang berkaitan dengan Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah amanat UU No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2005-2025, UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian, dan UU No.20/2008 tentang UMKM. RPJPN Menekankan bahwa kebijakan pemberdayaan koperasi dan UKM diarahkan untuk mendukung misi peningkatan daya saing bangsa dan pemerataan pembangunan dan berkeadilan.

Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi

No	Kebijakan Nasional / Provinsi	Sumber	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	Nasional		
1	Peningkatan Kualitas sumber daya manusia	Renstra 2018 -2023	
2	Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema Pembiayaan	Renstra 2018 -2023	
3	Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran	Renstra 2018 -2023	
4	Penguatan kelembagaan usaha	Renstra 2018 -2023	
5	Kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha	Renstra 2018 -2023	
B.	Provinsi		
1.	Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UMKM	Renstra 2018 -2023	
2	Peningkatan akses kepada sumber daya produktif	Renstra 2018 -2023	
3	Pengembangan produk dan pemasaran bagi Koperasi dan UMKM	Renstra 2018 -2023	
4	Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM	Renstra 2018 -2023	
5	Penguatan kelembagaan Koperasi	Renstra 2018 -2023	

Kebijakan dalam RPJMD yang ingin diterapkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone sesuai Visi dan Misi Rencana dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
IDENTIFIKASI KEBIJAKAN DALAM RPJMD
KABUPATEN BONE

NO.	KEBIJAKAN	SUMBER KET
1.	Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usah Kecil Menengah	RPJMD
2.	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	RPJMD
3.	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	RPJMD

3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Kabupaten Bone mencetuskan visi dengan terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholder’s dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Bone secara komprehensif, sehingga ditetapkan visi Kabupaten BoneTahun 2018-2023, yaitu:

“MASYARAKAT BONE YANG MANDIRI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.

4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Tujuan adalah suatu hasil yang ingin dicapai organisasi dan merupakan target – target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, disamping itu pencapaian target – target ini merupakan ukuran keberhasilan kerja. Berdasarkan visi, misi dan faktor – faktor kunci keberhasilan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Mengembangkan kemandirian ekonomi melalui koperasi dan usaha mikro “
2. Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah

Serta tiga Sasaran strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM adalah :

1. Meningkatnya koperasi yang berkualitas.
2. Meningkatnya Pertumbuhan kewirausahaan serta kualitas skala usaha mikro.
3. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro.

Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Kegiatan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sumber data	Penanggung jawab
	Mengembangkan kemandirian ekonomi melalui koperasi dan usaha mikro	Meningkatkan koperasi yang berkualitas	1.Jumlah Koperasi berprestasi 2.Pesentase Koperasi aktif 3. Persentase koperasi sehat 4. Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Peningkatan kapasitas kelembagaan dan produktifitas koperasi	1.Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Dan Program Pembangunan Koperasi 2.Sosialisasi Prinsip Prinsip Pemahaman Perkantoran 3.Pembinaan, Pengawasan Dan Penghargaan Koperasi Berprestasi 4.Peningkatan Dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi 5.Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 6.Pelatihan Manajemen Akuntansi Koperasi bagi Pengurus Pengelola USP 7.Pembinaan Dan Penilaian Kesehatan KSP/USP 8.Pembinaan Pemantauan Adminsitasi Keuangan KSP/USP 9.Kegiatan Pembinaan dan Pemnataan Adminitrasi Koperasi Pengelolaan Pasar Tradisional 10.Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi / KUD	Data keragaan Koperasi (ODS)	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan dan Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi

				4. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		1. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirasahaan		
		Meningkatkan Pertumbuhan Kewirausahaan serta kualitas skala usaha mikro	1. Persentase pertumbuhan usaha mikro menjadi usaha kecil 2. Persentase Usaha Mikro Dan Kecil 3. Pertumbuhan Volume Usaha Mikro	5. Program Pengembangan Siste Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	1. Persentase Peningkatan kualitas pelaku usaha mikro 2. Persentase peningkatan produktifitas usaha mikro, kecil dan menengah	1. Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 2. Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah 3. Pengembangan Kebijakan Dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal	Data Pemberdayaan Usaha Mikro	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

3.3 Program Dan Kegiatan

Dengan melihat Lampiran Tabel 4.1 (T.C.33) dapat disimpulkan bahwa rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bone Tahun 2020 telah disesuaikan dengan anggaran program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
 1. Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 3. Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 4. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang – Undangan
 5. Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah
 6. Pelaksanaan Adminitrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
 1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 2. Pengadaan Peralatan Gdung Kantor
 3. Pengadaan Mebeleur
 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5. Program Penunjang Pemerintahan Umum
 1. Penyusunan Rencana Perangkat Daerah
 2. Pengelolaan Website Perangkat Daerah
6. Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
 1. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

7. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
 1. Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
 2. Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah
 3. Pengembangan Kebijakan Dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal
 4. Pendataan UMKM
8. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
 1. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Dan Program Pembangunan Koperasi
 2. Sosialisasi Prinsip Prinsip Pemahaman Perkantoran
 3. Pembinaan, Pengawasan Dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
 4. Peningkatan Dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi
 5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 6. Pelatihan Manajemen Akuntansi Koperasi bagi Pengurus Pengelola USP
 7. Pembinaan Dan Penilaian Kesehatan KSP/USP
 8. Pembinaan Pemantauan Administrasi Keuangan KSP/USP
 9. Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Administrasi Koperasi Pengelolaan Pasar Tradisional
 10. Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi / KUD

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone dalam pelaksanaan pembangunan dalam bidang Koperasi dan Bidang Usaha Mikro mempunyai beberapa program sebagaimana termuat dalam RPJMD diantaranya:

1. Program Administrasi Perkantoran; tolok ukur dan hasil program ini adalah Cakupan ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran setiap tahun anggaran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; tolok ukur dan hasil program ini adalah cakupan realisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; tolok ukur dan hasil program adalah persentase ketersediaan aparat Pembina koperasi yang bersertifikat.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; tolok ukur dan hasil program ini adalah cakupan realisasi penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan setiap tahun anggaran.
5. Program Penunjang Pemerintahan Umum; tolok ukur dan hasil program ini adalah cakupan realisasi kegiatan penunjang pemerintahan umum setiap tahun anggaran.
6. Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif; tolok ukur dan hasil program ini adalah % Peningkatan kualitas pelaku usaha mikro.
7. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah; tolok ukur dan hasil program ini adalah % Peningkatan produktifitas usaha mikro, kecil, menengah.
8. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi; tolok ukur dan hasil program ini adalah % peningkatan kapasitas kelembagaan dan produktifitas koperasi

Tabel 4.1 (T-C.33)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020

dan Prakiraan Maju Tahun 2021

Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone

Nama Perangkat Daerah :Dinas Koperasi dan UKM Kab. Bone

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	15	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran setiap tahun anggaran			435,359,200	APBD / DAU			537,611,525
1	15	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat ketersediaan jasa komunikasi (telepon/fax dan internet).	Kecamatan Tanete Riattang	48 Rekening	68,000,000	APBD / DAU		48 Rekening	105,000,000
1	15	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi yang mendapatkan jasa keuangan selama setahun (kali).	Kecamatan Tanete Riattang	324 kali	96.859.200	APBD / DAU		324 kali	171,000,000

1	15	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja	Jumlah pemenuhan dan jasa dan komponen AC,Komputer dan printer (paket).	Kecamatan Tanete Riattang	4 paket	8,500,000	APBD / DAU		4 paket	9,000,000
1	15	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pembayaran media yang menyediakan bahan bacaan (kali).	Kecamatan Tanete Riattang	120 kali	10.000.000	APBD / DAU		120 kali	12,000,000
1	15	01	23	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah Dan Luar Daerah	Tingkat keikutsertaan Aparat dalam kegiatan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tupoksi organisasi (kegiatan)	Dalam daerah dan luar daerah	35 kegiatan	180,000,000	APBD / DAU		35 kegiatan	288,000,000
1	15	01	24	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan ATK,barang cetakan dan penggandaan serta makan dan minum harian/tamu (paket).	Kecamatan Tanete Riattang	48 paket	72,000,000	APBD / DAU		48 paket	98,000,000
1	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan realisasi peningkatan sarana dan prasarana aaratur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran		107,243,500	183,000,000	APBD / DAU			190,500,000

1	15	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor sesuai rencana kebutuhan satu tahun anggaran (paket).	1 paket	6.000.000	19,000,000	APBD / DAU	1 paket	5,500,000
1	15	02	07	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor sesuai rencana kebutuhan satu tahun anggaran (paket).	1 Paket	2,000,000	8,000,000	APBD / DAU	1 Paket	10,000,000
1	15	02	10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur sesuai rencana kebutuhan satu tahun anggaran (paket)	1 paket	7.000.000	15,000,000	APBD / DAU	1 paket	8,500,000
1	15	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin berkala gedung kantor (kegiatan)	1 kegiatan	10.293.500	59,000,000	APBD / DAU	1 kegiatan	60,500,000
1	15	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas (paket).	11 paket	81.950.000	82,000,000	APBD / DAU	11 paket	84,000,000
1	15	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ketersediaan aparat Pembina koperasi yang bersertifikat			98,000,000	APBD / DAU		93,000,000
1	15	05	01	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah aparat yang mengikuti kegiatan bimtek dan diklat structural (orang)..	Dalam daerah dan luar daerah	5 orang	98,000,000	APBD / DAU	5 orang	93,000,000

1	15	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan realisasi penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan setiap tahun anggaran			33,500,000	APBD / DAU			51,715,000
1	15	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan (dokumen).	Kecamatan Tanete Riattang.	5 Dokumen	33,500,000	APBD / DAU		5 Dokumen	39,000,000
1	15	08		Program Penunjang Pemerintahan Umum	Cakupan realisasi kegiatan penunjang pemerintahan umum dalam pelaksanaan tupoksi Dinas Koperasi dan UKM selama satu tahun anggaran			45,250,000	APBD / DAU			37,500,000
1	15	08	01	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, Renja perubahan, RKA, DPA, DPPA tersedia tepat waktu (dokumen)	Kecamatan Tanete Riattang.	5 Dokumen	32.250.000	APBD / DAU		6 Dokumen	22,000,000
1	15	08	02	Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Jumlah pemeliharaan website diskop yang dikelola (kegiatan)	Kec. Tanete Riattang	1Kegiatan	13,000,000	APBD / DAU		1 tahun	15,500,000
1	15	16		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Cakupan pelaksanaan pengembangan usaha bagi usaha mikro			41,500,000	APBD / DAU			160,000,000

1	15	16	06	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah UM yang dilatih dan difasilitasi bantuan alat usaha (UM)	Kel.watampone ,kec tonra (desa rappa),kec.kaju ara (desa pude,desa raja)	90 UM	41.500.000	APBD / DAU		90 UM	160,000,000
1	15	17		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Cakupan pelaksanaan pengembangan usaha bagi usaha mikro			297,550,000	APBD / DAU			414,000,000
1	15	17	05	Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah WUB yang dibina (WUB)	Kota/kecamatan.	120 WUB	27,500,000	APBD / DAU		120 WUB	53,000,000
1	15	17	09	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi promosi (UKM).	Dalam daerah,kab.kot a, luar daerah TK.1/pusat TK	20 UKM	153,500,000	APBD / DAU		20 UKM	201,000,000
1	15	17	10	Pengembangan Kebijakan Dan Program Peningkatan Ekonomi lokal	Jumlah keluarga miskin usia produktif yang difasilitasi pelatihan kewirausahaan (orang)	Kecamatan Cenrana	20 orang	44,650,000	APBD / DAU		20 orang	70,000,000
1	15	17	13	Pendataan UMKM	Jumlah data usaha mikro pertahun (UM).	Kab.bone	1800 UM	71,900,000	APBD / DAU		1800 UM	90,000,000
1	15	18		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Cakupan pelaksanaan program peningkatan kulaitas kelembagaan koperasi selama satu tahun anggaran			556,597,300	APBD / DAU			850,500,000

1	15	18	01	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Dan Program Pembangunan Koperasi	Jumlah koperasi yang difasilitasi penyuluhan dan mendapatkan legalitas lembaga (peserta)	5 Kecamatan	100 peserta	93,000,000	APBD / DAU		100 peserta	160,000,000
01	15	18	04	Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian	Jumlah SDM Pengurus/pengawas koperasi yang mengikuti sosialisasi (orang).	Kecamatan Tanete Riattang	100 orang	52,250,000	APBD / DAU		100 orang	70,500,000
1	15	18	05	Pembinaan Pengawasan Dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah koperasi berprestasi yang difasilitasi setahun berdasarkan pemeringkatan (penghargaan).	8 kecamatan	10 Penghargaan	98,500,000	APBD / DAU		10 Penghargaan	135,000,000
1	15	18	06	Peningkatan Dan Pengembangan Jaringan kerjasama Usaha Koperasi	Jumlah koperasi yang difasilitasi promosi/temu Mitra dengan pihak ketiga (koperasi).	Luar daerah provinsi.	5 Koperasi	29,500,000	APBD / DAU		5 Koperasi	40,000,000
1	15	18	09	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah koperasi yang di monitoring dan dievaluasi setahun (koperasi).	15 Kecamatan	35 Koperasi	30,500,000	APBD / DAU		35 Koperasi	42,000,000
1	15	18	11	Pelatihan Manajemen Akuntansi Koperasi Bagi Pengurus Pengelola USP	Jumlah pengurus/pengelola KSP/USP yang dilatih (orang).	Kecamatan Tanete Riattang	25 Orang	47,000,000	APBD / DAU		25 Orang	58,000,000
1	15	18	12	Pembinaan Dan Penilaian Kesehatan KSP/USP	Jumlah koperasi sehat yang dinilai (koperasi)	Beberapa Kecamatan	25 Koperasi	30,250,000	APBD / DAU		26 Koperasi	48,000,000
1	15	18	13	Pembinaan Pemantauan Administrasi Keuangan KSP/USP	Jumlah fasilitasi koperasi sehat (koperasi).	10 Kecamatan	10 Koperasi	98,000,000	APBD / DAU		10 Koperasi	147,000,000

1	15	18	17	Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Administrasi Koperasi Pengelolaan Pasar Tradisional	Jumlah pembinaan koperasi pasar Tradisional (kegiatan).	Kecamatan Tanete Riattang.	3 kegiatan	23,300,000	APBD / DAU		3 kegiatan	53,000,000
1	15	18	18	Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD	Jumlah koperasi /KUD yang dilatih (koperasi).	Kecamatan Tanete Riattang	70 koperasi	55,297,300	APBD / DAU		70 Koperasi	77,000,000
								1.615.000.000				2.360.500.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja PD) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bone tahun 2019 merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berisikan Tujuan, Sasaran, Kebijakan, program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu setahun kedepan yang mengarah pada pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Bone. Gambaran program/kegiatan ini merupakan kegiatan-kegiatan yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga Program/kegiatan yang direncanakan selama satu tahun kedepan merupakan turunan dari program-program yang ada didalamnya.

Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance sesuai dengan tuntutan paradigma baru.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) ini diharapkan program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini belum sempurna sesuai apa yang diharapkan oleh karena itu dengan segala kerendahan hati kami mengharapkan masukan dari segenap pihak yang berkompeten dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan Rencana Kerja ini.